

**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS  
KOMPUTER DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
KUALITAS KEUANGAN DI INSTANSI PEMERINTAHAN KAB. BONE**

**(Studi Kasus Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kab. Bone)**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar*

*Oleh:*

**Hasnidar**  
**10800111053**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2015-2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasnidar  
NIM : 10800111053  
Tempat/Tgl. Lahir : Bone 10 Agustus 1993  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi  
Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam  
Alamat : BTN Patri Abdullah permai C7 No.1  
Judul : “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer  
Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Di  
Instansi Pemerintahan Kab. Bone”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Maret 2016

Penyusun,

**Hasnidar**

**10800111053**

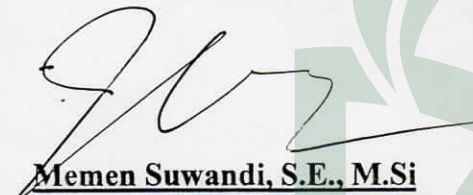
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Hasnidar, NIM: 10800111053, Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Instansi Pemerintahan Kab. Bone", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar hasil

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan dan diproses selanjutnya.

Samata, 26 Februari 2016

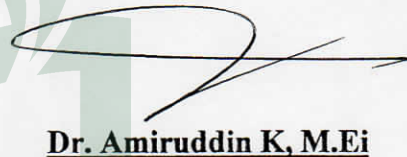
**Pembimbing I**



**Memen Suwandi, S.E., M.Si**

**NIP. 19750520 201101 2 004**

**Pembimbing II**



**Dr. Amiruddin K, M.Ei**

**NIP. 19640908 1999031 001**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Bone) ”** yang disusun oleh **Hasnidar**, Nim: **10800111053**, mahasiswi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 1 April 2016 M, bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 23 Jumadil Akhir 1437 H  
1 April 2016 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si. Akt. (.....)	(.....)
Munaqisy II	: Eka Suhartini, SE., MM	(.....)
Pembimbing I	: Memen Suwandi, SE., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Amiruddin K., M.Ei	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

  
**Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag**  
NIP: 19581022 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb

ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN. Rasa syukur tiada henti-hentinya diucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik tanpa adanya halangan apapun, adapun judul skripsi “ **PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS KEUANGAN DI INSTANSI PEMERINTAHAN**”.

Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua Ayahanda MAPPE dan Ibunda SOME yang telah menjadi sumber motivasi bagi penulis. Dan penulis ucapkan terimakasih juga kepada Kakak handa SAHARUDDIN yang telah memberikan saya semangat dan arahan-arahan yang positif, dan tak pernah lelah membantu kedua orang tua penulis membiayai penulis kuliah. Dan tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada adik tercinta HASRUDI dan DHAFITHA yang selalu merespon atas segala kegiatan yang penulis kerjakan. serta tak lupa kepada rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari, di dalam penulisan skripsi ini telah banyak rintangan ataupun cobaan namun dari ketekunan dan kerja keraslah yang menggerakkan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan tersebut, dan juga karna adanya dukungan moral dan materi dari berbagai pihak yang membantu memudahkan langkah penulis.

Selesainya skripsi ini yang di buat oleh penulis, perkenankan pula penulis untuk menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. MusafirPababbariM.Si. selakuRektorUniversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M. Ag, selaku dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Majid, S.E., M.Si., Selaku Ketua jurusan akuntansi universitas islam negeri (UIN) alauddin makassar.
4. Bapak Memen suwandi, S.E., M.Si., selaku sekertaris jurusan akuntansi universitas islam negeri (UIN) alauddin makassar.
5. Bapak Memen suwandi, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Amiruddin k., M. EI, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta saran yang berguna selama penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri (UIN) alauddin makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf akademisi fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri (UIN) alauddin makassar yang telah membantu semua urusan yang penulis butuhkan



8. Kepada bapak pimpinan dan staf kariawan DPRD, kantor pemadam kebakaran, dinas kebudayaan dan parawisata yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama proses penelitian.
9. Serta tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga bapak Andi Alfian yang telah mengisinkan penulis tinggal di rumahnya selama kurang lebih 3 tahun, dan tak pernah lelah memberiku semangat dan motivasi di saat penulis lagi banyak masalah
10. Teman-teman seangkatan 2011, yang tak pernah bosan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada penulis. Terkhususnya bagi teman-teman AK 3-4 yang telah menjadi keluarga kecil bagi penulis
11. Teman-teman KKN angkatan ke 50, desa kanaungan, kec. Labakkang, kab. Panggep, samsul, awi, andar, iffah, dan herma terimakasih atas pengalaman singkat yang sangat berharga serta kebersamaan dan perjuangan selama KKN
12. Serta teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu , terimakasih atas dukungan serta motivasi yang selama ini diberikan kepada penulis

Semoga dari semua bantuan, bimbingan, doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, dari segenap kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi tersebut.

Samata, Maret 2016

**HASNIDAR**  
**NIM. 10800111053**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Hipotesis.....	7
D. Definisi Operasional Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. <i>Teori Technology Acceptance Model (TAM)</i> .....	19
B. <i>Teori Agensi (Agency Theory)</i> .....	21
C. Sistem Informasi Akuntansi.....	23
D. Pengendalian Internal.....	26
E. Kinerja Instansi Pemerintah.....	27
F. Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	29
G. Hubungan Antar Variabel.....	33
H. Kerangka Pemikiran.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum .....	50
B. Hasil Uji Kualitas Data .....	55
C. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	70
D. Hasil Uji Penelitian .....	71



E. Hasil Uji Hipotesis .....	77
F. Pembahasan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1Hasil Uji Normalitas – Histogram.....	.. 66
Gambar 4.2Hasil Uji Heteroskedastisitas – <i>Scatterplot</i> .....	..67



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Defenisi Operasional Variabel.....	10
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	55
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	56
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	57
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4.7 Ikhtisar Rentang Skala Variabel.....	59
Tabel 4.8 Pernyataan Responden Mengenai Sistem Informasi Akuntansi.....	60
Tabel 4.9 Pernyataan Responden Mengenai pengendalian Internal.....	62
Tabel 4.11 Pernyataan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X1).....	66
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal (X2).....	67
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).....	67
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas.....	68
Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas - <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i> .....	70
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinearitas.....	73
Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	76
Tabel 4.22 Hasil Uji F- Uji Simultan.....	76
Tabel 4.23 Hasil Uji T Hitung.....	77

## ABSTRAK

**Nama : Hasnidar**  
**NIM : 10800111053**  
**Judul : Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Dan Penegendalian Internal Terhadap Kualitas Keuangan Di Instansi Pemerintahan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone)**

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh sisten informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. (2) Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kab. Bone provinsi Sulawesi Selatan (SULSEL).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan yaitu anggota DPRD, kantor pemadam kebakaran dan dinas kebudayaan dan prawisata dengan total populasi 3. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini adalah 32 orang. Untuk penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan alat program statistic (*SPSS 22*), setelah uji asumsi klasik terpenuhi.

Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis komputer berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone sedangkan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone. Di dalam penelitian tersebut juga dapat di ketahui bahwa kedua fariabel tersebut berpengaruh secara simultan terhdad kualitas laporan keuangan sbagai variabel (Y). dan adapun fariabel yang paling dominan yang terdapat pada penelitian tersebut adalah variabel (X2) yaitu sistem pengendalian internal.

Kata kunci: *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dan Sistem Pengendalian Internal, terhadap Kualitas La poran Keuangan Pemerintah Daerah*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Upaya kongrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemrinthaan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Bandi (2014). Lapora keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepatwaktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005.Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPD/DPRD dan masyarakat umum seelah di audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingn sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karna itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. mengemukakan

bahwa sudah menjadi konsekuensi jika laporan keuangan tersebut harus dilaporkan secara terbuka dan aksesibel bagi para pengguna informasi karena laporan keuangan itu merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan mandat dari masyarakat dan mewujudkan *good governance* dipemerintahan daerah itu sendiri (Vincent 2009).

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Hasbuan, dkk. 2013). penyampaian laporan pertanggungjawaban itu merupakan salahsatu bentuk agent kepada principal. Ketika terjadi kepentingan yang berbeda antara principal dan agent maka akan menimbulkan masalah keagenan, sehingga mereka dapat memiliki persepsi yang berbeda untuk mengitrepertasikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 17 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa gubernur/bupati/wali kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang No. 33 tahun 2004 yang merubah akuntabilitas atau



pertanggungjawaban pemerintah daerah dari vertical (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Komite standar akuntansi pemerintahan (2013) mengemukakan bahwa penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas dari laporan keuangan itu sendiri serta didukung oleh adanya transparansi dari laporan keuangan tersebut.

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain system informasi berbasis teknologi computer atau *website*. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang dikembangkan suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negative suatu kebijakan operasional yang diambil. Mecling (2008) mengemukakan kualitas program berhubungan dengan akuntabilitas public, karna pemerintah sebagai pengembang amanat masyarakat bertanggungjawab atas kualitas yang telah dilakukannya, hal tersebut karna pemerintah berkewajiban untuk mengelola program pembangunan dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Dalam hal indikator kualitas, sebagai dasar untuk mengukur kualitas, di pakai indikator input, output, outcome, benefit dan impact. Dalam kenyataan, indikator yang dapat didefinisikan hanyalah input dan output, sedangkan indikator lainnya lebih sulit diukur dan ditentukan keberhasilannya (Marjiono, 2009).

Hal terakhir yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri. Pada tahun 2008 pemerintah

mengeluarkan peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 tentang system pengendalian internal pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan untuk memadai bagi tercapainya: a.) Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara; b.) Keandalan laporan keuangan; c.) Pengamanan asset Negara; dan d.) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kompyurini dan Prasetyono (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap manfaat yang dirasakan. Pemerintah kota Bone merasakan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada sector public. Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan teknologi informasi, dapat berdampak pada pemerintahan teknologi informasi, karna pada umumnya teknologi informasi sudah terbukti dapat memberikan kemudahan dalam membantuk kegiatan di sector public dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sementara dalam penelitian Dedi Rianto(2013) menyebutkan bahwa kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan, serta pengendalian internal akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian Nyoman (2013) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan system pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penjelasan ini di perkuat dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa Ayat 58 yang berbunyi :

رَبِّمَا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ □ □ □  
بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ □ □ □

**Terjemahannya :**

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan ( menyuruh kamu ) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi MahaMelihat”. (QS: An-Nisaa Ayat: 58)

Makna dari ayat di atas sejalan dengan *agency theory* dalam hubungannya dengan mekanisme *sistem informasi akuntansi berbasis komputer* yang mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan oleh prinsipal.

Adapun yang melatar belakangi penelitian ini karna dari beberapa priode, kabupaten Bone mendapat predikat disclaimer atau tidak memberikan pendapat dari badan pemeriksa keuangan (BPK) atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan berupa laporan keuangan pemerintahan. Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran pertanggungjawaban dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga kemungkinan bahwa laporan keuangan kabupaten Bone belum maksimal. Karna di mana di dalam instansi pemerintahan tersebut kurang memadainya komputer dan jaringan yang di sediakan di dalam pemerintahan tersebut sehingga menghambat transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah, krna dimana pengguna informasi keuangan penting di lakukan karna pengguna data mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan analisis.

Menurut Vina (2009) mengemukakan bahwa sudah menjadi konsekuensi jika laporan keuangan tersebut harus dilaporkan secara terbuka dan aksesibel bagi

para pengguna informasi karna laporan keuangan itu merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan mandate dari masyarakat dan mewujudkan good governance di pemerintahan daerah itu sendiri.

Menurut Ramadhani, dkk (2014) yang dikutip dalam Governmental accounting Standard Board (GASB, 1998) tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik dan untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso dan paul D. Kimmel (2005) yang dikutip dalam *Accaunting Principles* mengemukakan bahwa pengguna membutuhkan informasi yang rinci dan tepat waktu. Bagi para pengguna internal, akuntansi memberikan laporan-laporan internal. Selain itu, informasi yang telah diiktisarkan, di sajikan dalam bentuk laporan keuangan agar memudahkan para pengguna dalam sistem informasi akuntansi dalam menerapkan kepada masyarakat agar masyarakat mampu mengetahui perkembangan laporan keuangan di dalam pemerintahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik tentang pengaruh system informasi akuntansi berbasis komputer dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di instansi pemerintahan. penting untuk di teliti mengingat sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut berimbas kepada kepercayaan public terhadap kualitas laoran keuangan secara lengkap dan mudah di akses oleh publik, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji

“PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kab. Bone)

#### B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan apa yang ada dalam latar belakang dapat di simpulkan sebuah masalah yaitu diantaranya :

1. Apakah ada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah ada pengaruh SPIP (sistem pengendalian internal pemerintahan) terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan dengan laporan keuangan?
4. Variabel manakah yang paling berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan?

#### C. Pengembangan Hipotesis

##### 1. **Sistem informasi Akuntansi**

Perkembangan sistem informasi akuntansi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan pemerintah No 56 tahun 2005 tentang system informasi keuangan daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dalam pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk

membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Diduga terjadi pengaruh jenis positif dan signifikan dalam penelitian tersebut.

Dalam teori keagenan (*agency theory*) juga dijelaskan bahwasanya pihak agensi dan pihak prinsipel memiliki hubungan atau kontrak Anthony dan Govindarajan (2005). Pihak agensi dan pihak prinsipel dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat atau pengguna laporan keuangan. Pemerintah dan masyarakat memiliki suatu hubungan atau kontrak dimulai sejak masyarakat memberikan wewenang kepada masyarakat sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu pemerintah dituntut agar lebih transparan dan akuntabel sehingga masyarakat bisa menilai kinerja dari pemerintah itu sendiri yaitu dengan menyajikan laporan keuangan daerah.

Dalam hal sistem informasi akuntansi dalam penyajian informasi yang lengkap, maka akan menciptakan kualitas laporan keuangan serta nantinya menimbulkan kualitas laporan keuangan yang baik. Semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya penggunaan informasi keuangan daerah. Untuk melihat pengaruh pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan maka akan menimbulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## **2. Pengendalian Internal**

Dalam penelitian terdahulu tentang system pengendalian internal

Indriasari dan Nahartyo (2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai

laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatan waktu dan kerendahan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tersebut bermaksud menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan, dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

Masih ditemukannya kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang di syatkan. Dari hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini TW “tidak wajar dan/ atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (badan pemeriksa keuangan (2011). Diduga terjadi pengaruh jenis positif dan signifikan dalam penelitian ini.

H2 : sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### **3. Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh Simultan terhadap kualitas laporan keuangan**

pemerintahan daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya (Mardiasmo (2004: 31). Karena hal ini merupakan satu tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah sehingga publik bias menilai kualitas dari pemerintahan itu sendiri serta pengendalian internal pemerintahan. Dalam teori keagenan (agency theory) juga dijelaskan bahwasanya pihak agensi dan pihak prinsipal memiliki hubungan kontrak (Anthony dan Govindarajan (2005). Pihak agensi dan pihak prinsipal dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat atau pengguna laporan keuangan. Pemerintah dan masyarakat memiliki suatu hubungan atau kontrak dimulai sejak masyarakat memberikan wewenang kepada masyarakat sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu pemerintah dituntut agar lebih



transparan dan akuntabel sehingga masyarakat bisa menilai kinerja dari pemerintah itu sendiri yaitu dengan menyajikan laporan keuangan daerah.

Dalam penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Bandary (2011), Saputra (2012), dan Ramadhani (2014) mengatakan bahwasanya hasil dari penelitian tersebut yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang terdahulu seperti Bandary (2011), Saputra (2012), dan Ramadhani (2014) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam hal penyajian informasi laporan keuangan yang lengkap, maka akan menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Semakin baik sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya kualitas laporan keuangan daerah. Untuk melihat pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap penggunaan informasi keuangan daerah maka hipotesisnya sebagai berikut:

H3 : X1 sistem informasi akuntansi dan X2 pengendalian internal terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintahan Daerah berpengaruh secara simultan.

#### **4. Variabel paling dominan adalah (X2) sistem pengendalian internal**

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian Mahmudi dalam Hamdani (2011) menyatakan bahwa, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Widyaningsih dan Triantoro (2011) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan meningkatkan sistem pengendalian intern yang lebih baik. Sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif ditunjang dengan sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Dianggap terdapat pengaruh yang paling dominan terhadap kualitas laporan keuangan

H4 : dari variabel (X2) pengendalian internal lebih dominan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **D. Definisi Operasional Variabel**

##### **a. Variabel Independen**

Menurut Sugiyono (2011: 64) variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi (X<sub>1</sub>) dan pengendalian internal (X<sub>2</sub>).

##### **1. Sistem informasi akuntansi**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi (X<sub>1</sub>). Penggunaan informasi keuangan daerah berkaitan dengan penilaian para pengguna laporan keuangan daerah ( DPRD, kantor pemadam kebakaran, dinas kebudayaan dan pariwisata ) terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

## 2. Pengendalian internal

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mendorong efisiensi, dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, ketika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan dengan baik maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, ketika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan dengan baik maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

### b. Variabel dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011: 64). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan merupakan suatu cara penyampaian untuk memberikan informasi kepada pihak luar mengenai laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah terutama yang ada di kab. Bone, karena hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada pihak luar.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Entitas pelaporan

menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan asset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

#### E. Penelitian Terdahulu

Indriasari dan Nahartyo (2008); Sukmaningrum (2012) bahwa terdapat tingkat signifikan yang berbeda dari masing-masing variable atribut kualitas laporan keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Tabel 1.1 berikut mengemukakan penelitian terdahulu yang relevan.

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Desi Indriasari dan Erambang Nahartyo (2008)	pengaruh kapabilitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir)	pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Arfianti (2011)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan <i>Timeliness</i> pelaporan	Variable independen yang digunakan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,

		<p>keuangan Badan layanan Umum (studi pada blu di kota semarang).</p>	<p>pengendalian internal akuntansi, dan komitmen organisasi. Variable dependen yang digunakan adalah keandalan dan timeliness pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan dan <i>Timeliness</i> pelaporan keuangan.</p>
3.	<p>indriasari dan nahartyo (2008)</p>	<p>Bagaimana hubungan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi,</p>	<p>bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif.</p>

4.	arifianti (2011)	SPIP (system pengendalian internal pemerintah), teknologi informasi pelaporan keuangan.	menyatakan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintahan daerah, system pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan.
5.	Marjuki Sagala (2011)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial.
6.	Siti Aliyah, dkk. (2012)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

		Daerah Kabupaten Jepara.	
7.	Anies Iqbal Mustofa (2012)	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
8.	Peggy Sande (2013)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini terutama merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Peggy Sande (2013). Namun ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Sande, 2013) adalah:



- (1) Pada penelitian sebelumnya, objek yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan pada penelitian ini, wilayah yang menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Bone.
- (2) Pada penelitian sebelumnya, populasi penelitian merupakan pengguna internal laporan keuangan yaitu SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sementara pada penelitian ini populasi penelitian merupakan pengguna eksternal yaitu DPRD.

## **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disini dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam melihat apa yang terjadi dalam rumusan masalah

- a. Menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- b. Menganalisis pengaruh penerapan SPIP (sistem pengendalian internal pemerintahan) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memecahkan apa yang ada dalam pengungkapan materi tentang bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
- d. Dalam penelitian tersebut dapat di bandingkan antara variable manakah yang paling dominan

### **Manfaat Penelitian**

- a. Adapun manfaat teoritis dalam penulisan skripsi tersebut adalah

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thson et.al. (1991) dalam wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh

pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personal yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

b. Adapun manfaat praktis dalam penelitian skripsi tersebut adalah

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam system informasi akuntansi berbasis komputer untuk menyusun laporan keuangan secara akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah terkhususnya kabupaten BONE serta meningkatkan transparansi untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian bagi pemerintahan ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan melalui SIA.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### ***A. Teori Technology Acceptance Model (TAM)***

TAM merupakan teori yang menjelaskan minat berperilaku menggunakan teknologi informasi. Teori tersebut dikembangkan oleh Davis (1989) dan kemudian digunakan oleh beberapa peneliti lain. TAM berbasis pada *theory of reasoned action* (TRA) yang dikembangkan Fishbein dan Ajzen (1975 dalam Sanjaya, 2005). TRA merupakan model yang secara luas mengkaji psikologi sosial mengenai perilaku seseorang yang dilakukan secara sadar. Berdasarkan TRA, minat berperilaku berkaitan erat dengan perilaku spesifik individu dan merupakan proses yang dilakukan secara sadar. Sedangkan sikap dan norma subjektif adalah anteseden perilaku tersebut. Sikap merupakan perasaan positif atau negatif tentang target perilaku, sedangkan norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang orang lain atau sekelompok orang atau referensi lainnya yang memikirkan apa yang dilakukan atau tidak harus dilakukan mengenai perilaku tertentu.

Dalam konteks teknologi informasi (dalam penelitian ini penggunaan internet), para peneliti akan mengidentifikasi keyakinan yang menonjol pada subjek berdasarkan pada investigasi sebelumnya. Atribut-atribut yang menonjol berkaitan dengan teknologi informasi secara tidak langsung dapat mempengaruhi minat dan norma subjektif dan selanjutnya dikelompokkan sebagai variabel internal. Dengan demikian TRA menangkap variabel-variabel internal melalui beberapa variabel eksternal yang berkaitan dengan teknologi informasi (Palupi dan Tjahjono, 2010).

*Technology Acceptance Model* (TAM) mengasumsikan bahwa penggunaan sistem pada kenyataannya ditentukan oleh niat perilaku pengguna yang didasarkan pada persepsi kebermanfaatan (*Perceived Usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*). TAM menyatakan bahwa secara keseluruhan perilaku manusia dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan kepercayaannya. Dapat dikatakan bahwa seorang individu akan menggunakan teknologi sistem informasi dengan baik apabila sistem tersebut mudah digunakan serta menghasilkan manfaat dan menguntungkan dalam peningkatan kinerjanya (Davis *et al.*, 1989).

Model TAM adalah teori sistem informasi yang memuat model mengenai sikap individu untuk menerima dan menggunakan teknologi. Teori TAM diadopsi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yaitu teori yang menjelaskan bahwa persepsi seseorang terhadap sesuatu akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. TAM pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi perilaku personal untuk menerima dan menggunakan teknologi. Dua faktor tersebut adalah kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) (Surendran, 2012).

Sama dengan TRA, TAM menjelaskan bahwa penggunaan komputer ditentukan oleh tujuan perilaku, namun perbedaannya adalah bahwa tujuan perilaku ditinjau secara bersama-sama ditentukan oleh sikap individu terhadap penggunaan sistem dan persepsi kegunaan. Hubungan antara penggunaan sistem dan tujuan perilaku yang digambarkan dalam TAM menunjukkan secara tidak langsung bentuk-bentuk tujuan individu untuk melakukan tindakan yang positif. Hubungan antara persepsi kegunaan dan tujuan perilaku didasarkan pada ide bahwa dalam penyusunan suatu organisasi, orang-orang membentuk tujuan-tujuan

terhadap perilaku yang diyakininya akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **B. Agency Theory**

Celviana Windiyaningrum (2010), menjelaskan bahwa pengertian laporan keuangan Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Hara, Hasibuan 2010).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Nunuk, Febriananingsih. 2012).

Adapun dalil dalam hadits dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

**Artinya:** “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”

Dari dalil-dalil tentang amanah dan jujur dapat di hubungkan dengan konsep akuntansi yang membahas secara singkat tentang konsep akuntansi yang mencakup tentang konsep kualitas laporan keuangan, konsep amanah/tanggung jawab, konsep jujur, konsep profesionalisme, konsep independensi dan konsep transparansi.

Laporan keuangan mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati *independent* yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010/(SAP). Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2005).

Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk di dengar aspirasinya.

### **C. Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan (Baridwan, 2009:3). Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama (Hall, 2009:6). Onaolapo and Odetayo (2012) menyatakan bahwa sistem akan memproses data dan mengubah mereka menjadi informasi akuntansi selama input, proses, dan output tahap yang akan digunakan oleh berbagai pengguna internal dan pengguna eksternal. Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi



keuangan, dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak di luar perusahaan, seperti kreditur, calon investor, kantor pajak dan lain-lainnya memerlukan informasi ini dalam kaitannya dengan kepentingan mereka.

Pihak intern perusahaan yaitu manajemen juga memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan untuk menjalankan usahanya (Baridwan, 2009:3). Turban *et al.* (2006:52) menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diatur sehingga memiliki makna dan nilai bagi penerimanya. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah bahasa bisnis karena dengan akuntansi sebagian besar informasi bisnis dikomunikasikan. Perusahaan mendistribusikan laporan akuntansi yang meringkas kinerja keuangan perusahaan kepada pemilik, kreditur, pemerintah, dan calon investor (Jusuf, 2011:4).

Bordnar dan Hopwood (2006:6) menyatakan bahwa sistem informasi adalah suatu proses yang mengubah atau memproses data menjadi sebuah informasi. Data yang disimpan merupakan suatu penegasan selama proses berlangsung, semua input yang masuk diolah menjadi keluaran semuanya. Data yang masuk atau keluar yang dihasilkan dapat disimpan, kemudian pada saat diperlukan akan diolah kembali atau bersama input yang baru, atau diambil kembali dari penyimpanan untuk menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi pengguna informasi. Onaolapo dan Odetayo (2012) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berfungsi untuk memberikan nilai kuantitatif dari masa lalu, sekarang dan masa depan ekonomi kejadian melalui komputerisasi akuntansi sistem (kontrak plus) menghasilkan laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, neraca dan aliran pernyataan.

Soudani (2012) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah alat yang ketika dimasukkan ke dalam bidang informasi dan sistem teknologi (IT), yang dirancang untuk membantu dalam pengelolaan dan pengendalian topik dengan organisasi ekonomi daerah keuangan. Salehi et al. (2011) menyatakan bahwa kendala dalam melaksanakan sistem informasi akuntansi adalah kurangnya dukungan dari manajer. Sistem informasi akuntansi adalah komponen dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengolahan peristiwa keuangan (Zare, 2012).

Sistem informasi akuntansi memberikan kesempatan bagi pebisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif (Edison *et al*, 2012). Sistem informasi dianggap sebagai faktor penting dalam pencapaian kinerja yang lebih besar terutama dalam proses pengambilan keputusan (Al-eqab and Adel, 2013).

### **Sistem Informasi Berbasis Komputer**

Turban *et al.* (2006:49) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer (*computer-based information system- CBIS*) adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan beberapa atau seluruh pekerjaan yang diberikan. Sistem informasi berbasis komputer merupakan satu rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasi data menjadi informasi yang berguna (Gangga, 2013). Sistem informasi berbasis komputer adalah komputer yang memproses transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan dan dukungan tugas keputusan dalam konteks koordinasi dan pengendalian kegiatan organisasi.

Sistem informasi berbasis komputer dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: sistem *batch*, dan sistem *real-time*. Sistem *Batch* terdapat jeda antara waktu

terjadinya kegiatan ekonomi dengan waktu pencatatannya dan umumnya menggunakan lebih sedikit sumber daya (peranti keras, pemrograman, pelatihan) yang dibutuhkan serta *record* tertentu diproses setelah peristiwa terjadi untuk menghindari penundaan operasional. Sistem *real-time* pemrosesan dilakukan ketika kegiatan ekonomi terjadi dan lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan dari pada pemrosesan *batch* serta semua *record* yang berkaitan dengan peristiwa diproses segera (Hall, 2009:97).

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

#### **D. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Seperti telah diuraikan dalam pendahuluan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengendalian intern didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

##### **1. Pengendalian intern akuntansi**

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi.

Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

## 2. Pengendalian administratif

Pengendalian ini Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

SPIP merupakan suatu langkah nyata bagi pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Rizki, Dwi Prabowo. 2013. menyebutkan subkomponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor; (2) pemisahantugas; (3) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputer, 2009): (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya pengendalian intern : (1) Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan asset, (2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

#### **E. Kinerja Instansi Pemerintah**

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Yayan, Agussupiantoro (2013) mengemukakan kinerja program berhubungan dengan akuntabilitas publik, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggungjawab atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola program pembangunan dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Dalam hal indikator kinerja, sebagai dasar untuk mengukur kinerja, dipakai indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*.

Dalam kenyataan, indikator yang dapat dengan tepat diidentifikasi hanyalah *input* dan *output*, sedangkan indikator yang lain lebih sulit diukur dan ditentukan keberhasilannya (Mahmudi 2012). Menurut Mardiasmo2011. indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses menetapkan indikator-indikator dan target kinerja dan mengumpulkan hasil-hasil kinerja aktual untuk dievaluasi. Kinerja diukur untuk melihat pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

kegiatan atau program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan akuntabilitas Eko, Harry Susanto. 2013. Kinerja pemerintah daerah dengan sendirinya merupakan keseluruhan capaian atau hasil-hasil selama pelaksanaan otonom daerah. Untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang diharapkan perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah daerah. Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah telah dilakukan setelah dikeluarkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menanggapi instruksi tersebut, Lembaga Administrasi Negara dan BPKP menyusun buku pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan suatu laporan kinerja instansi yang bersifat vertikal yaitu laporan kepada instansi yang di atasnya dan kepala Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. Alur pelaporan LAKIP untuk pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999 ( Sumber: Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2003 dalam Sihaloho, 2005). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap sebagai berikut :

1. Penetapan rencana strategik
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan apabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi di integrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi dalam arti lain pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data. Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian hardware yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak Pujonggo,(2004).

Menurut model yang dikembangkan Thompson et al. (1991) dalam Tjhai (2003) yang mengadopsi sebagian teori yang diusulkan oleh Trandis (1980), dalam Astuti dan I ketut (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi system informs yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi :

1. Faktor sosial
2. *Affect* (perasaan individu)
3. Kesesuaian tugas
4. Konsekuensi jangka panjang
5. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi
6. Kompleksitas

#### **F. Kualitas laporan keuangan**

Kualitas Laporan Keuangan Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005 : KK-10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

kualitas laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana. Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran kita harus menyempurnakan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah: QS.Al-Israa': 35

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكُمُ الْمُسْتَقِيمُ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا كَيْلًا وَإِذَا الْكَيْلُ وَأَوْفُوا

**Terjemahannya:**

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah akuntansi dalam konsep islam dapat didefenisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah islam dan dipergunakan



sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa (Nasution, 2008).

Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) berbasis akrual No. 1 (Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010) bahwa tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola;
- (b) Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

- (c) Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban;
- (d) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Diamond, 2002).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

1. Masyarakat
2. para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan pemerintah.

#### **F. Hubungan antar variable**

- ***Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Computer Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

Selamet (2011) dalam Silviana (2013) mengungkapkan Salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspektersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuanganyang baikPelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusatdan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi KeuanganDaerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Sistem informasi akuntansipada pemerintahan daerah lebih dikenal dengan nama sistem informasi keuangan daerah(SIKD).

SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. (PP 65 /2010) Pemerintahan Daerah sebagai organisasi sektor publik, agar dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yang memadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan. SIKD yang diterapkan di pemda sesudah periode 2005 berbasis desentralisasi, pengguna SIKD adalah Kepala Daerah, bahkan memungkinkan dan mengharuskan para manajer pemerintah (perangkat) daerah (Kepala Badan, Kantor, Dinas dan Unit lainnya) untuk menggunakan SIKD, sebab Kepala Daerah bukan satu-satunya pengambil keputusan anggaran, namun telah terdistribusi ke unit-unit yang lebih bawah. Fakta empiris menggambarkan kewenangan formal dimiliki oleh Kepala (Syafuddin, 2006).

Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 2005/PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah, diperlukan sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dihasilkan dari laporan keuangan yang disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007). Efektivitas SIA dapat memberikan informasi yang diterima manajemen untuk membantu keputusan yang bersangkutan. Efektivitas SIA dapat dievaluasi sebagai manfaat nilai tambah. Efektivitas SIA adalah ukuran keberhasilan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan SIA dapat diartikan penerapannya menguntungkan, menjadi perhatian utama

organisasi, memberikan kepuasan bagi banyak pengguna dan meningkatkan kualitas kinerja mereka.(Moscove et. al, 2009).

Proses sistem informasi akuntansi terdiri dari input, output, penyimpanan data, prosesor, pengguna, dan tindakan pengendalian. Data dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem informasi. Data berarti dan berguna, karenanya, harus diproses dan diubah ke bentuk yang bermakna, terorganisir, dan berguna yang disebut informasi. Output adalah informasi yang berarti dan berguna yang dihasilkan oleh sistem informasi.

Gelinas (2000) dalam Silviana (2013) menganggap efektivitas SIA sebagai ukuran keberhasilan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan SIA dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi organisasi, secara luas digunakan oleh satu atau lebih pengguna, dan meningkatkan kualitas kinerja mereka. Beberapa penelitian mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah telah dilakukan oleh Diana (2005), menemukan kendala-kendala yang dihadapi Pemda dalam rangka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dari yang berbasis kas menjadi kas modifikasi akrual, diantaranya: lemahnya sumber daya manusia yang memahami akuntansi di bagian keuangan, memerlukan durasi waktu yang lama (masa transisi) setiap kali ada perubahan sistem dari sistem lama ke sistem baru, lambannya penyusunan Peraturan daerah sehubungan dengan perubahan sistem, pemilihan alternatif model sistem akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia yang berbasis *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS) yang menggunakan basis akrual dengan sistem akuntansi dari pemerintah yang menggunakan basis kas dimodifikasi.

Mahdavi dan Funnel (2003) melakukan penelitian mengenai implementasi SIA pada Republik Islamik Iran. Hasil penelitian menunjukkan walaupun SIA sangat diperlukan di Pemerintahan Iran, namun masih terdapat kendala dalam penerapan SIA. Di Iran, masih menggunakan *cash basis*, sehingga masih membutuhkan perubahan sistem, diterbitkannya teknik dan prosedur akuntansi pemerintahan belum memadai untuk mencapai program keuangan pemerintah. Untuk menerapkan konsep akuntabilitas, diperlukan perubahan akuntansi akrual di sektor pemerintahan. Penelitian Mahdi et. al, (2010), menunjukkan (1) *software* informasi akuntansi belum mampu *improve* standar akuntansi di Iran, (2) *software* informasi akuntansi belum berkaitan dengan sistem keuangan dan sistem manajerial, (3) SIA belum mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan perusahaan, (4) SIA belum mampu memberikan informasi untuk semua level manajemen. SIA di masa lalu fokus pada pencatatan, peringkasan, validasi data transaksi keuangan organisasi.

Abdul (2009). Meneliti pengaruh implementasi sistem akuntansi, terhadap fungsi pengawasan. Hasil penelitian implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap fungsi audit intern sebesar 0,937%. Implementasi sistem akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan pemda dapat dilakukan dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas, sehingga pengawasan akuntansi dapat dilakukan dengan baik. Mahmoud (2009) dalam Silviana (2013), meneliti bagaimana efektivitas SIA berdampak pada kinerja organisasi. Pembelajaran organisasi dan dukungan organisasi berpengaruh terhadap efektivitas SIA. Pornpan dejwittaya (2012), meneliti efektivitas SIA mengacu pada mengumpulkan, input, memproses data, menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan informasi laporan akuntansi sehingga organisasi dapat mencapai kualitas laporan keuangan.

- ***Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et all (2005) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Salah satu bagian didalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (internal control).

Weygand tetall (2005) dalam Herawati (2014) mengungkapkan bahwa: “Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannyapengendalian internal dalam system akuntansi, maka sistem akuntansi akanmenghasilkan informasi akuntansi yang lebihberkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, danlengkap), dan dapat diaudit (Auditabel).

Hall (2007:182)dalam Herawati (2014) mengemukakan fungsi dari sistem pengendalian internal yaitu sebagai pelindung yang melindungi aktiva perusahaan dari banyaknya peristiwa yang tidak diinginkan yang menyerang perusahaan. Ini semua meliputi usaha untuk akses secara tidak sah ke aktiva perusahaan, penipuan yang dilakukan oleh orang dalam dan luar perusahaan, kesalahan karena karyawan

tidak kompeten, program komputer salah data input yang rusak, dan lain sebagainya.

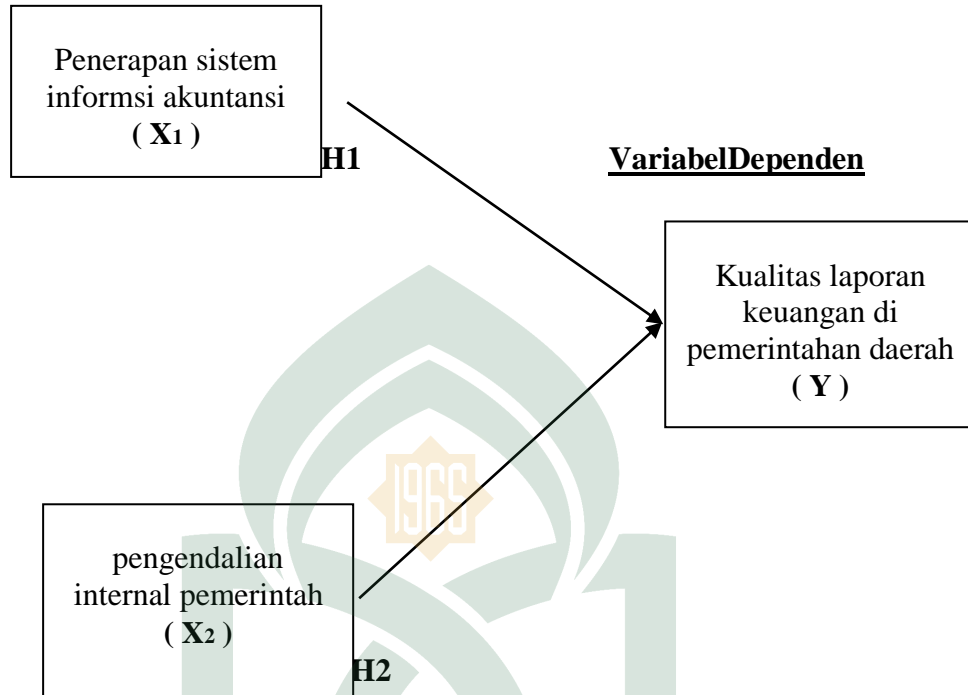
Mahmudi (2007: 27) dalam Herawati (2014) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

### ***G. Kerangka Pikir***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hubungan antara variable terikat yaitu pelaporan keuangan dengan variable bebas yaitu penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan sistem pengendalian internal. Telah dijelaskan bahwa peraturan pemerintah No 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah, dan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Selain melalui pengadaan sistem informasi berbasis komputer, pengendalian internal yang optimal juga mampu mendukung tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan mengutamakan aspek ketepatan waktu serta keterandalan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, dibentuk kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Pikir

**Variabel Independen**

Pada gambar diatas variable Y merupakan variable Dependen yaitu variable yang dapat dipengaruhi, variable X variable yang merupakan variable independen yaitu variable yang dapat di pengaruhi. Jadi variable Y dapat dipengaruhi Variabel X1 dan X2. Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa dari dua variable X tersebut sangat mempengaruhi perkembangan variable Y.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, waktu dan penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data , metode analisis data dan uji asumsi klasik. Secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

##### **A. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan berupa catatan atas laporan keuangan daerah dengan menginformasikan system informasi akuntansi berbasis computer dan pengendalian internal di instansi pemerintahan.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif asosiatif, penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: individu, organisasi, industry atau perspektif yang lain. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk

menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subyek yang diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok dan organisasi), kejadian atau prosedur.

### C. Populasi dan Penentuan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Bone (DPRD, Kantor Pemadam Kebakaran, Dinas Kebudayaan dan Prawisata). Kabupaten Bone terdistribusi 27 kecamatan, 333 desa, dan 39 kelurahan, RSUD, dan inspekturat. Pemilihan ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Bone karena pada tahun 2012 provinsi Sulawesi Selatan dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan cukup tinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

#### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Mahmudi, 2011). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tatausaha keuangan di masing-masing bidangnya,

- b. Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dari sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data (Sugiono, 2011:308) untuk diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variable penelitiannya itu pengaruh system informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, kinerja keuangan di instansi pemerintahan (DPRD, Kantor pemadam kebakaran, Dinas Kebudayaan dan Prawisata). Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung kepada sampel penelitian yaitu pejabat structural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tatausaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bone.

#### E. Instrumen Penelitian

**Tabel 3.2**  
**Instrumen penelitian dan skala pengukuran**

No	Variable	Definisi variable	Indicator	Skala
1.	System informasi akuntansi (X1)	Sitem informasi akuntansi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut,	1. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Ramadhani (2014)	Ordinal

		tujuan yang lebih penting dalam pelaporan ini adalah kepuasan pengguna informasi Ramadhani (2014)		
2	pengendalian internal (X2)	Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. I Gusti Agung Rai (2008:283)	1. Nilai integritas dan etika 2. Komitmen terhadap kompetensi 3. Filosofi dan gaya operasi manajemen 4. Stuktur organisasi;	Ordinal
3	Kualitas laporan keuangan (Y)	Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan Bandary (2011)	1. Kelengkapan 2. Ketepatan waktu 3. Andal 4. Dapat diuji 5. Dapat dibandingkan 6. Sebagai tolak ukur 7. Bebas dari kesalahan 8. Dapat dipahami Sande (2013)	ordinal

Adapun perincian untuk skala likert menggunakan angka-angka sebagai berikut:

- Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- Angka 3 = Ragu-Ragu (R)

- Angka 4 = Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih mudah diinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian Sugiyono (2011: 332). Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah Sugiyono (2011: 332). Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka.

Adapun alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert fungsinya yaitu memberikan skor pada masing-masing jawaban pernyataan alternatif tersebut. Kemudian dari alternatif tersebut jawaban tersebut diproses dan diolah untuk dipergunakan sebagai alat pengukur variabel yang diteliti. Kemudian nilai - nilai alternatif jawaban diproses dan diolah untuk digunakan sebagai alat ukur variabel yang diteliti dengan menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 22 *for Windows*.

#### **1. Uji Kualitas Data**

##### **a. Uji Validitas Data**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner Ghazali(2001 : 105 ). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan atau pernyataan adalah valid.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk Ghazali(2001: 106). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja.

Pengukuran *one Shot* hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,06$  Ghazali, (2001: 107 )

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Adapun penjelasan dari uji ini adalah sebagai berikut:

### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Bila nilai residual tidak berdistribusi normal, maka uji statistika menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam menguji normalitas data maka ada dua cara yang dapat digunakan yaitu analisis grafik dan analisis statistik

### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai  $VIF > 10$ , terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika  $VIF < 10$ , tidak terjadi multikolinearitas.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau  $VIF > 10$

### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada

tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPREDdimana dasar analisisnya adalah :

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas
- Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

### 3. Uji Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen).

#### Uji Simultan (Statistik F)

Uji statistik F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah fix atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level  $\alpha = 0,05$ . Apabila nilai sig yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah fix.

#### a. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh sebuah variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau  $(\alpha) =$



0,05 (5%). Jika nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel dengan signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan di bawah 0,05.

#### 4. Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2009). Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. *Statistical Package For Sosial Science* (SPSS) 22 akan digunakan untuk membantu proses analisis regresi linear berganda. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Ket:

Y : kualitas laporan keuangan

X1 : sistem informasi akuntansi

X2 : pengendalian internal

a : Konstanta

b1 : Koefisien regresi dari X1

b2 : Koefisien regresi dari X2

e : Kesalahan residual (error turn)

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variables bebas menjelaskan variable terikat (Ghozali, 2007). Nilai koefisien tererminasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berarti semakin tinggi kemampuan variable independent dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variable dependen





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Bone**

Kerajaan Bone dahulu terbentuk pada awal abad ke- IV atau pada tahun 1330, namun sebelum Kerajaan Bone terbentuk sudah ada kelompok-kelompok dan pimpinannya digelar Kalula Dengan datangnya To Manurung ( Manurungge Ri Matajang ) diberi gelar Mata Silompo-E. maka terjadilah penggabungan kelompok-kelompok tersebut termasuk Cina, Barebbo, Awangpone dan Palakka. Pada saat pengangkatan To Manurung Mata Silompo- E menjadi Raja Bone, terjadilah kontrak pemerintahan berupa sumpah setia antara rakyat Bone dalam hal ini diwakili oleh penguasa Cina dengan 10 Manurung ,sebagai tanda serta lambang kesetiaan kepada Rajanya sekaligus merupakan pencerminan corak pemerintahan Kerajaan Bone diawal berdirinya.Disamping penyerahan diri kepada Sang Raja juga terpatrit pengharapan rakyat agar supaya menjadi kewajiban Raja untuk menciptakan keamanan, kemakmuran, serta terjaminnya penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat. Adapun teks Sumpah yang diucapkan oleh penguasa Cina mewakili rakyat Bone berbunyi sebagai berikut :

1. Angikko kuraukkaju riyaaomi'ri riyakkeng
2. Kutappalireng elomu elo rikkeng adammukkuwa mattampako
3. Kilao.Maliko kisawe. Millauko ki abbere.
4. Mudongirikeng temmatippang. Muamppirikkeng
5. Temmakare. Musalimurikeng temmadinging “ terjemahan bebas ;

- a. Engkau angin dan kami daun kayu, kemana berhembus kesitu kami menurut kemauan dan
- b. Kata-katamu yang jadi dan berlaku atas kami, apabila engkau mengundang kami menyambut
- c. dan apabila engkau meminta kami memberi, walaupun anak istri kami jika tuanku tidak senang kamipun tidak
- d. Menyenanginya, tetapi engkau menjaga kami agar tentram, engkau berlaku adil melindungi agar kami makmur
- e. Dan sejahtera engkau selimuti kami agar tidak kedinginan ‘

Budaya masyarakat Bone demikian Tinggi mengenai sistem norma atau adat berdasarkan Lima unsur pokok masing-masing : Ade, Bicara, Rapang, Wari dan Sara yang terjalin satu sama lain, sebagai satu kesatuan organis dalam pikiran masyarakat yang memberi rasa harga diri serta martabat dari pribadi masing-masing. Kesemuanya itu terkandung dalam satu konsep yang disebut “ SIRI “merupakan integral dari ke Lima unsur pokok tersebut diatas yakni pangadereng ( Norma adat), untuk mewujudkan nilai pangadereng maka rakyat Bone memiliki sekaligus mengamalkan semangat/budaya :

1. Sipakatau artinya : Saling memanusiaikan , menghormati / menghargai harkat dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai mahluk ciptaan ALLAH tanpa membedakan, siapa saja orangnya harus patuh dan taat terhadap norma adat/hukum yang berlaku
2. Sipakalebbi artinya : Saling memuliakan posisi dan fungsi masing-masing dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan, senantiasa berperilaku yang baik sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat

3. Sipakainge artinya: Saling mengingatkan satu sama lain, menghargai nasehat, pendapat orang lain, manerima saran dan kritikan positif dan siapapun atas dasar kesadaran bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan

Pada tahun 1605 Agama Islam masuk di Kerajaan Bone dimasa pemerintahan Raja Bone ke X Latenri Tuppu Matinroe Ri Sidenreng. Pada masa itu pula sebutan Matoa Pitu diubah menjadi Ade Pitu ( Hadat Tujuh ), sekaligus sebutan Matoa Mengalami Pula Perubahan Menjadi Arung misalnya Matua Ujung disebut Arung Ujung dan seterusnya. Demikian perjalanan panjang Kerajaan Bone, maka pada bulan Mei 1950 untuk pertama kalinya selama Kerajaan Bone terbentuk dan berdiri diawal abad ke XIV atau tahun 1330 hingga memasuki masa kemerdekaan terjadi suatu demonstrasi rakyat di kota Watampone yaitu menuntut dibubarkannya Negara Indonesia Timur, serta dihapuskannya pemerintahan Kerajaan dan menyatakan berdiri dibelakang pemerintah Republik Indonesia Beberapa hari kemudian para anggota Hadat Tujuh mengajukan permohonan berhenti.

Disusul pula beberapa tahun kemudian terjadi perubahan nama distrik/onder distrik menjadi Kecamatan sebagaimana berlaku saat ini. Pada tanggal 6 April 1989 melalui rumusan hasil seminar yang diadakan pada tahun 1989 di Watampone dengan diperkuat Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bone No.1 Tahun 1990 Seri C, maka ditetapkanlah tanggal 6 April 1330 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bone dan diperingati setiap tahun .

## **2. Letak Geografi Dan Potensi wilayah**

Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan, secara Geografis letaknya sangat strategis karena adalah pintu gerbang pantai timur Sulawesi Selatan yang merupakan pantai Barat Teluk Bone memiliki garis pantai yang cukup panjang membujur dari Utara ke Selatan menelusuri Teluk Bone

tepatnya 174 Kilometer sebelah Timur Kota Makassar, luas wilayah Kabupaten Bone 4,556 KM Bujur Sangkar atau sekitar 7,3 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan, didukung 27 Kecamatan, 335 Desa dan 39 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 648,361 Jiwa. Kabupaten Bone berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut ; Sebelah Utara Kabupaten Wajo Sebelah Selatan Kabupaten Sinjai Sebelah Barat Kabupaten Soppeng, Maros, Pangkep dan Barru Sebelah Timur adalah Teluk Bone yg menghubungkan Propinsi Sulawesi Tenggara Untuk jelasnya 27 Kecamatan di Kabupaten Bone dicantumkan sebagai berikut ;

1. Kecamatan Tanete Riattang
2. Kecamatan Tanete Riattang Barat
3. Kecamatan Tanete Riattang Timur
4. Kecamatan Palakka
5. Kecamatan Awangpone
6. Kecamatan SibuluE
7. Kecamatan Barebbo
8. Kecamatan Ponre
9. Kecamatan Cin
10. Kecamatan Mare
11. Kecamatan Tonr
12. Kecamatan Salomekko
13. Kecamatan Patimpeng
14. Kecamatan Kajuara
15. Kecamatan Kahu
16. Kecamatan Bontocani

17. Kecamatan Libureng
18. Kecamatan Lappariaja
19. Kecamatan Bengo
20. Kecamatan Lamuru
21. Kecamatan Tellu LimpoE
22. Kecamatan Ulaweng
23. Kecamatan Amali
24. Kecamatan Ajangale
25. Kecamatan Dua BoccoE
26. Kecamatan Tellu SiattingE
27. Kecamatan Cenrana

### **3. Topografi Dan Pemanfaatan Lahan**

Kalau kita amati Kabupaten Bone termasuk daerah tiga dimensi yaitu ; Pantai, Daratan dan Pegunungan, luas sawah sebagai lahan pertanian adalah 455.600 Ha, sehingga Kabupaten Bone ditetapkan sebagai daerah penyangga beras untuk Propinsi Sulawesi Selatan yang biasa dikenal dengan istilah BOSOWA SIPILU singkatan dari Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwu, begitu pula daerah pantainya sangat panjang membujur dari Utara ke Selatan yang menyusuri Teluk Bone dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, 9 diantaranya adalah masuk daerah pantai seperti Kecamatan Cenrana, Tellu SiantingE, Awangpone, Tanette Riattang Timur, SibuluE, Mare, Tonra, Salomekko dan Kajuara, dengan demikian sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Bone sebagian besar adalah Petani dan Nelayan.



## B. Hasil Penelitian

### 1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, Peneliti menyebarkan Kuesioner sebanyak 50 rangkap dan dikembalikan sebanyak 40 rangkap jadi terdapat 7 rangkap kuesioner yang tidak terisi dan 3 kuesioner yang tidak dapat di olah. Hal ini terjadi pada responden untuk anggota DPRD dan dinas pemadam kebakaran karna kuesioner tersebut harus diberikan langsung kepada responden sementara sebagian besar dari mereka tidak berada di tempat ketika peneliti melakukan penelitian. Gambaran yang di peroleh tentang karakteristik responden akan dilakukan dengan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	50	100 %
Kuesioner yang tidak kembali	10	7,8 %
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	3	2,2 %
Kuesioner yang dapat diolah	32	70 %

Sumber: Data primer diolah 2015

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja pada dinas daerah Kabupaten Bone. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja.

### a. Jenis Kelamin

Hasil olah data untuk jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.2. menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 22 orang atau sebesar 80,00%.

**Tabel 4.2**  
**Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	10	20,00
Perempuan	22	80,00
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>100,00</b>

Sumber : data primer, diolah 2015

### b. Usia

Hasil olah data untuk tingkat usia responden dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa usia responden rata-rata berkisar antara 31 hingga 50 tahun atau sebesar 68,90%.

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Usia Responden**

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
20-30	5	11,10
31-50	18	68,90
51-60	9	20,00
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>100,00</b>

Sumber : data primer, diolah 2015

### c. Nama Instansi

Hasil olah data untuk nama instansi responden dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Instansi responden yang paling banyak berada pada Instansi DPRD 12 responden dan Dinas Kebudayaan dan Parawisata 12 responden atau sebesar 41,10%.

**Tabel 4.4**  
**Nama Instansi Responden**

<b>Nama Instansi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
DPRD	12	41,10
Dinas kebudayaan dan Parawisata	12	41,10
Kantor Pemadam Kebakaran	8	17,80
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>100,00</b>

Sumber : data primer, diolah 2015

### d. Pendidikan

Hasil olah data untuk pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.4. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak berada pada pendidikan sarjana S1 27 responden atau sebesar 78,70%.

**Tabel 4.5**  
**Pendidikan Responden**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
D3	1	2,60
S1	27	78,70
S2	4	18,70

<b>Total</b>	32	100,00
--------------	----	--------

Sumber : data primer, diolah 2015

#### e. Masa Kerja

Hasil olah data untuk masa kerja responden dapat dilihat pada tabel 4.5. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat masa kerja responden yang paling banyak berada pada >10 tahun atau sebesar 53,30%.

**Tabel 4.6**  
**Masa Kerja Responden**

<b>Masa Kerja</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
<5 Tahun	1	2,70%
5-10 Tahun	13	40,40%
>10 Tahun	18	53,30%
<b>Total</b>	32	100,00

Sumber : data primer, diolah 2015

## 2. Analisis Deskriptif

### a. Analisis Deskriptif Fariabel

**Tabel 4.7**  
**Deskritif Fariabel**

#### Descriptive Statistics

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
SIA	32	22.00	40.00	33.0000	4.23503
PI	32	31.00	45.00	38.4375	4.25735
LK	32	29.00	50.00	42.4375	5.33363
Valid N (listwise)	32				

(sumber: Ouput SPSS 22)

Tabel 4.7 menunjukkan statistic deskriptif dari masing-masing variable penelitian. Berdasarkan table 4.7 hasil analisis menggunakan statistic deskriptif terhadap variable kualitas. Sistem informasi akuntansi menunjukkan nilai minimum sebesar 22,00 nilai maksimum sebesar 40,00 mean (rata-rata) sebesar 33,00 dengan standar devisi sebesar 4,235, selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap pengendalian internal menunjukkan nilai minimum sebesar 31,00 dan maksimum sebesar 45,00 mean (rata-rata) sebesar 38,43 dengan standar devisi sebesar 4,257, sedangkan untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah nilai minimum sebesar 29,00 nilai maksimum sebesar 50,00 mean (rata-rata) sebesar 42,43 dengan standar devisi sebesar 5,333

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variable kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu 42,43, sedangkan yang terendah adalah variabel sistem informasi akuntansi yaitu 33,00 untuk standar devisi tertinggi berada pada variable kualitas laporan keuangan yaitu 5,35 dan yang terendah adalah SIA yaitu 4,23.

#### b. Analisis Deskriptif Pernyataan

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah ISA, kepatuhan auditor, dan kualitas audit. Distribusi frekuensi atas jawaban responden dari hasil tabulasi skor data. Berdasarkan rumus yang digunakan yaitu :

$$C = \frac{\text{Skala Tertinggi} - \text{Skala Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$C = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,80, dengan demikian rentang skala 0,80 tersebut dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Ikhtisar rentang skala variabel**

<b>Rentang</b>	<b>ISA (International Standards On Auditing)</b>	<b>Kepatuhan Auditor</b>	<b>Kualitas Audit</b>
$1 \leq X < 1,80$	SR	SR	SR
$1,80 \leq X < 2,60$	R	R	R
$2,61 \leq X < 3,40$	S	S	S
$3,41 \leq X < 4,20$	T	T	T
$4,21 \leq X < 5$	ST	ST	ST

Ket :

SR : Sangat Rendah  
 R : Rendah  
 S : Sedang  
 T : Tinggi  
 ST : Sangat Tinggi

#### 1) Analisis Deskriptif Variabel SIA ( $X_1$ )

Analisa deskripsi terhadap variabel sistem informasi akuntansi yang terdiri dari 8 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai SIA, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya bahwa dari 32 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada sistem informasi akuntansi ( $X_1$ ) berada pada daerah tinggi dengan skor 4,136 Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap pengawasan

internpada pemerintah Kota Bone. Pada pengaruh system informasi akuntansi ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi terdapat pada aspek melaksanakan pencatatan secara kronologis untuk setiap transaksi keuangan, memiliki indeks yakni sebesar 4,343. Sementara nilai indeks terendah yaitu pada pelaksanaan proses pengklasifikasian terhadap setiap transaksi keuangan sebesar 4 dengan kategori pelaksanaan yang tinggi.

## 2) Analisis Deskriptif Variabel Penerapan System Pengendalian Internal ( $X_2$ )

Analisa deskripsi terhadap variable penerapan System Pengendalian Internal yang terdiri dari 9 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai kompetensi sumber daya manusia, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat bahwa dari 32 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada penerapan system pengendalian internal pemerintah ( $X_2$ ) berada pada daerah yangtinggi dengan skor 4,246. Hal ini berarti bahwa respzonden memberikan persepsi yang baik terhadap peneraan system pengendalian internal terhadap kualitas keuangan di instansi pemerintahan Kab.Bone. Pada faktor penerapan sisten pengendalian rerlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,468 terdapat pada laporan keuangan disamping kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) pegawai terkait keuangan daerah akan membantu pegawai SKPD dalam menguasai dan mengembangkan keahlian akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang baik. Hal ini berarti dengan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laoran keuangan lebih memberika kemudahan PPKD dalam mendapatkan informasi sebagai dasar enyusunan laporan keuangan

pemerintahan. Sementara nilai indeks terendah yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan melalui internet (websites)

### 3) Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Analisa deskripsi terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 10 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai kualitas laporan keuangan, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat bahwa dari 32 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) berada pada daerah sedang dengan skor 4,243. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang baik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bone. Pada faktor kualitas laporan keuangan ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi terdapat pada aspek penyajian yang jujur (apa adanya) serta akurat tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 3,343. Sementara nilai indeks terendah yaitu laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang sebesar 4,031 dalam kategori pelaksanaan yang baik.

## C. Hasil Uji Kualitas Data

Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

### 1. Uji Validitas



Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui *item* pernyataan itu valid dengan melihat nilai *Corrected Item Total Correlation*. Apabila item pernyataan mempunyai  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel ( $n$ ) = 32 responden dan besarnya  $df$  dapat dihitung  $32 - 2 = 30$  dengan  $df = 30$  dan  $\alpha = 0,05$  didapat  $r$  tabel = 0,338 (sumber: lampiran tabel 15, Ghazali, 2013). Jadi, *item* pernyataan yang valid mempunyai  $r$  hitung lebih besar dari 0,338. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada masing-masing tabel berikut :

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Validitas Variabel SIA (X1)**

Instrumen penelitian	$r$ hitung	$r$ table	Keterangan
Item_1	0,680	0.338	Valid
Item_2	0,604	0.338	Valid
Item_3	0,726	0.338	Valid
Item_4	0,516	0.338	Valid
Item_5	0,525	0.338	Valid
Item_6	0,643	0.338	Valid
Item_7	0,790	0.338	Valid
Item_8	0,713	0.338	Valid

(Sumber: Data primer tahun 2015, diolah)

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation*  $>$  dari  $r$  tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal (X2)**

Instrumen penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Item_1	0,700	0.338	Valid
Item_2	0,745	0.338	Valid
Item_3	0,709	0.338	Valid
Item_4	0,619	0.338	Valid
Item_5	0,560	0.338	Valid
Item_6	0,733	0.338	Valid
Item_7	0,784	0.338	Valid
Item_8	0,802	0.338	Valid
Item_9	0,654	0.338	Valid

(Sumber: Data primer tahun 2015, diolah)

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel pengendalian internal yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Instrumen penelitian	r hitung	r table	Keterangan
Item_1	0,793	0.338	Valid
Item_2	0,824	0.338	Valid
Item_3	0,596	0.338	Valid
Item_4	0,639	0.338	Valid
Item_5	0,813	0.338	Valid
Item_6	0,813	0.338	Valid
Item_7	0,570	0.338	Valid
Item_8	0,863	0.338	Valid
Item_9	0,776	0.338	Valid
Item_10	0,703	0.338	Valid

(Sumber: Data primer tahun 2015, diolah)

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing

instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

### 1. Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Konsep reliabilitas dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalensi dan reliabilitas konsistensi internal.

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ), koefisien reliabilitas > 0,60.

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas reliabilitas	Ket.
Sistem informasi akuntansi	0,809	0.60	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,870	0.60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,909	0.60	Reliabel

(Sumber: Data primer tahun 2015, diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang

digunakan untuk menjelaskan variabel system informasi akuntansi, pengendalian internal dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

#### **D. Analisis Data**

##### **1. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Interpretasinya ditunjukkan sebagai berikut:

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian *one sample kolmogorov-smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar  $> 0,05$ . Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu histogram.

Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai *Kolmogorov-smirnov*. Dari tabel 4.18 dapat dilihat signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,01, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.39126679
Most Extreme Differences	Absolute	.188
	Positive	.154
	Negative	-.188
Test Statistic		.188
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

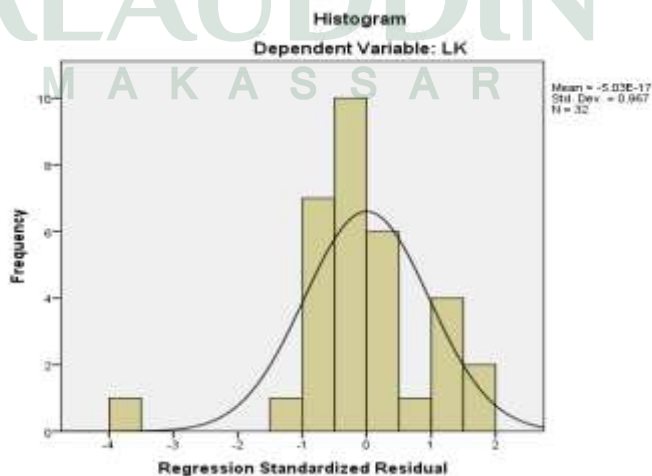
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber: Output SPSS 22)

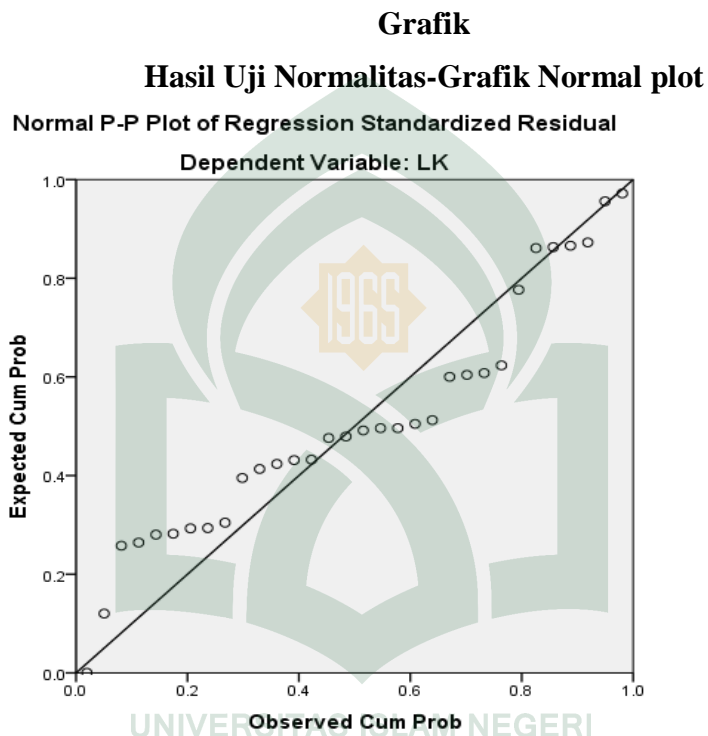
Bentuk grafik histogram berikut juga menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Grafik normal plot juga mendukung hasil pengujian dengan grafik histogram.

**Gambar 4.18**  
**Hasil Uji Normalitas – Histogram**



(Sumber: Output SPSS 22)

Dapat dilihat bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



(sumber: Output SPSS 22)

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Ghozali (2013: 105) menyatakan bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua tau lebih variabel independen
- b. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflations factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance  $\leq 0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ .

Berikut adalah hasil uji multikolonieritas :

**Tabel 4.19**

**Uji Coefficients**

**Coefficients<sup>a</sup>**

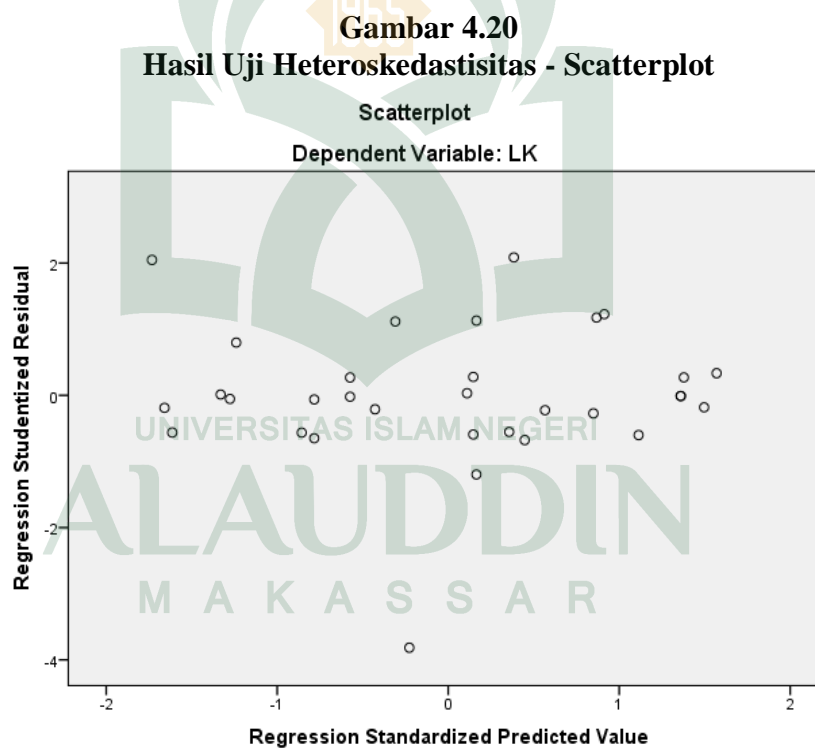
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.876	6.527		.594	.557		
SIA	.075	.158	.060	.474	.639	.882	1.134
PI	.939	.158	.749	5.960	.000	.882	1.134

a. Dependent Variable: LK

(Sumber: Output SPSS 22)

c. Uji Heteroskedastisitas

Grafik Scatterplot penelitian ini terlihat menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedestisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan masukan variabel independennya (sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi system informasi akuntansi, sistem pengendalian internal).



(Sumber: Output SPSS 22)

Hasil uji heteroskedasitas dari gambar 4.20 menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar



secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengawasan SIA (X1), dan pengendalian internal (X2).

## 2. Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis  $H_1$  dan  $H_2$  menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (system informasi akuntansi berbasis komputer dan Pengawasan Internal) terhadap variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah). Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 22.

### a. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian $H_3$

Pengujian hipotesis  $H_1$  dan  $H_2$  dilakukan dengan analisis regresi berganda system informasi akuntansi, pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut.

**Tabel 4.21**  
**Hasil Uji F – Uji Simultan**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	525.354	2	262.677	21.367	.000 <sup>b</sup>
	Residual	356.521	29	12.294		
	Total	881.875	31			

a. Dependent Variable: LK

b. Predictors: (Constant), SIA, PI

(Sumber: Output SPSS 22)

Dari hasil formula excel,  $=FINV(\text{prob}, df1=2, df2=29)$  maka dapat di peroleh F table sebesar 3,32 dari hasil erhitungan SPSS di eroleh nilai F hitung sebesar 21,367 dan F table sebesar 3,32. Krna nilain nilai F hitung lebeh besar dari nila F table ( $21,367 > 3,32$ ) dengan tingkat siknifikan sbesar 0,000<sup>b</sup> dengan nilai (sig)=0,000<sup>b</sup> <0,05. Dengan demi kian secara simultan daat di simulkan bahwa (x1) system informasi akuntansi dan (X2) pengendalian internal berpengaruh signifikan terhada (Y) kualitas laoran keuangan.

Pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui signifikansi korelasi system informasi akuntansi (X1) dan pengendalian internal (X2), secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bone. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 21.367 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 2,24. Dapat diketahui bahwa  $F_{hitung} (21,367) > F_{tabel} (2,24)$  jadi hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji juga diperoleh nilai P value sebesar 0,000<sup>b</sup> lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya berarti bahwa secara simultan, system informasi akuntansi (X1), dan pengendalian internal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) di SKPD kotaBone.

**Tabel 4.22**  
**Hasil Uji T Hitung**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.876	6.527		.594	.557
SIA	.075	.158	.060	.474	.639
PI	.939	.158	.749	5.960	.000

a. Dependent Variable: LK

(Sumber: Output SPSS 22)

Berdasarkan tabel 4.21 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 3.876 + 0,075 X_1 + 0,939 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X1 = sistem informasi akuntansi

X2 = pengendalian internal

a = Konstanta

b1, b2, b3 = Koefisien regresi

e = Standar error

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Nilai konstanta sebesar 3.876 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal) adalah nol maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan terjadi sebesar 3.876

2) Koefisien regresi variable pengendalian internal ( $X_2$ ) sebesar 0,939 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variable system informasi akuntansi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,939. Berdasarkan uji T diperoleh bahwa nilai T hitung sebesar 0,474 dan t table sebesar 2,045 dengan tingkat signifikansi 0,639. Karena t hitung lebih kecil dari T tabel ( $0,474 < 2,045$ ) dan tingkat signifikansi lebih besar dari banding 0,05 dan nilai t hitung bertanda positif dengan maka secara parsial variable independen system informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat diketahui  $X_1$  dan  $X_2$  berpengaruh signifikan terhadap Y

3) Koefisien regresi variabel sistem informasi akuntansi ( $X_1$ ) sebesar 0,075 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengendalian internal akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah sebesar 0,075.

### Uji hipotesis

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian ( $H_1$  dan  $H_2$ ) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

1) Pengaruh sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $H_1$ )

Berdasarkan tabel 4.22, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara SIA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Bone. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 22 menunjukkan bahwa nilai p value hasil perhitungan

pengawasan SIA (X1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,639 pada taraf kesalahan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai  $p$  0,639 lebih besar dari taraf kesalahan 0,05 ( $0,639 > 0,05$ ).

Menguji signifikansi bisa juga dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada taraf kesalahan 5%, jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka korelasi tersebut signifikan, dan jika nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  maka korelasi tersebut tidak signifikan. Kemudian untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak adalah dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% dan  $df = n-k$  yaitu  $32-1=31$  sebesar 1,695. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  ( $0,479 < 1,695$ ) maka terdapat korelasi yang tidak signifikan. Jadi hasil penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang belum efektif dan efisien belum berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone.

## 2) Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $H_2$ )

Berdasarkan tabel 4.22 terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Bone. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 22

menunjukkan bahwa nilai *p value* hasil perhitungan sistem pengendalian internal pemerintahan (X2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,000 pada taraf kesalahan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *p* 0,000 lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ).

Menguji signifikansi bisa juga dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada taraf kesalahan 5%, jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka korelasi tersebut signifikan, dan jika nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  maka korelasi tersebut tidak signifikan. Kemudian untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak adalah dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% dan  $df = n - k$  yaitu  $32 - 1 = 31$  sebesar 1,695. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $5,960 > 1,695$ ) maka terdapat korelasi yang signifikan. Jadi hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan kualitas penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang berkompeten dalam mengelola laporan keuangan pemerintah daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **b. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel sistem informasi

akuntansi( $X_1$ ) dan variabel pengendalian internal ( $X_2$ ) dapat menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan( $Y$ ).

**Tabel 4.23**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 <sup>a</sup>	.595	.568	3.50626

a. Predictors: (Constant), SIA, PI

(Sumber: Output SPSS 22)

Berdasarkan tabel diatas nilai  $R$  adalah 0,772 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai  $R^2$  (*Adjusted R Square*) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,595 hal ini berarti bahwa 59,5% yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Sisanya sebesar 40,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

## **E. PEMBAHASAN**

Penelitian mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang melibatkan pengaruh variabel bebas (penerapan system informasi akuntansi, penerapan system pengendalian internal) terhadap variabel independen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah), dapat dibuat pembahasan sebagai berikut:

1. Penerapan system informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa peneraan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang tidak optimal maka tidak akan memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, penerapan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebab hasil analisis menunjukkan ketidaksignifikan variabel system informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa responden penelitian berpendapat dengan penerapan system informasi akuntansi yang tidak optimal maka tidak akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan system informasi akuntansi tidak memenuhi fungsinya dalam hal memberikan informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Komponen teknologi sistem komputer mempercepat transmisi data yang mana akan mendukung penciptaan proses nilai informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambilan keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal laporan keuangan pemerintahan sehingga tidak mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Dalam Hal ini tidak sejalan dengan cita-cita pemerintahan dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 yang mengatur



tentang criteria kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat dalam pengambilan keputusan oleh semua pengguna dan stakeholders.

Teknologi ini mendukung literature-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, suatu pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi computer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu Dita (2011) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan Faristina (2011), Celviana dan Rahmawati (2010) yang menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* tetapi pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal (Wahana Komputer, 2003).

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bone.

## 2. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa penerapan system pengendalian internal pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, dengan menerapkan sisten pengendaliuan internal pemerintahan yang optimal maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, penerapan system pengendalian internal pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa responden penelitian berpendapat dengan pengawasan intern yang optimal maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan system pengendalian internal telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan dan efektifitas dan efisiensi operasi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu Ponamon (2013). Hasil penelitiannya menyatakan

bahwa penerapan system pengendalian internal pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kotaBone.

Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan juga menjadi salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan temuan BPK-RI atas kurangnya pengawasan intern yang mengindikasikan terjadinya kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sehingga BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas sebagian besar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah kota/daerah di Indonesia. Untuk LKPD kota Makassar, BPK memberikan opini WDP selama lima tahun berturut-turut (2009-2014). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan intern di pemerintahan daerah Kab bone dikategorikan cukup baik walaupun belum biasa dikatakan baik sekali karena belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semakin pengawasan intern pemerintah daerah maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menjaga integritas data yang dimiliki agar tetap akurat, konsisten dan mencerminkan kualitas data merupakan tanggung jawab suatu organisasi dalam melaksanakan pengendalian internal terhadap entitasnya tersebut. Selain itu, Ketepatan input dan posting data keuangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam menjamin kualitas penyajian laporan pertanggungjawaban suatu organisasi. Adanya sistem otorisasi dan pembatasan akses terhadap segala bentuk pemrosesan transaksi oleh pihak yang berwenang akan menjamin data keuangan dalam suatu organisasi tetap aman. Dilaksanakannya perumusan dalam penyusunan kebijakan yang sehat tentang

pengawasan intern sangat diperlukan sebagai pendukung penerapan pengawasan intern dalam suatu organisasi. Pada akhirnya, setiap alat ukur dari pengawasan intern yang dilaksanakan secara optimal akan berimplikasi pada peningkatan kualitas penyajian laporan pertanggungjawaban suatu entitas yang dalam hal ini pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bone.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh tiga variable independen yaitu penerapan system informasi akuntansi dan penerapan system pengendalian internal pemerintahan dan variable dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh sistem informasi akuntansi berbasis komputer di dalam penelitian ini di simpulkan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis komputer berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini di simpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.
3. Pengaruh sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem informasi akuntansi yang

efektif dan efisien, penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta penerapan akrual basis yang baik akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Dalam penelitian tersebut dapat di ketahui bahwa variabel yang paling dominan terhadap kualitas laporan keuangan adalah variabel (X2) sistem pengendalian internal. Karna pengendalian internal lah yang mampu memperoleh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### ***B. Keterbatasan***

Keterbatasan atau hambatan yang dihadapi penulis selama melakukan penelitian adalah :

1. Penelitian ini menguji pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan peneraan sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa pengaruh variable independen terhadap variable dependen hanya sebesar 59,5%, sehingga 40,5% dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah secara umum karena penelitian ini hanya mengambil populasi di satu pemerintah kota saja, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Bone.
3. Penelitian hanya mengambil sampel 3 SKPD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Bone karena ke terbatasan waktu penelitian, perizinan

yang sedikitrunit, serta respon dari beberapa kantor SKPD yang kurang mendukung untuk diadakannya penelitian.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil dan beberapa keterbatasan yang dikemukakan di atas, makadapatdiberikan saran sebagaiberikut:

1. Penelitian selanjutnya lebih memperluas populasi dan sampel penelitian untuk meneliti di beberapa kabupaten/kota sehingga terhadap hasil yang diperoleh dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum dan lebih representatif.
2. Pemerintah daerah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Bone, diharapkan untuk lebih meningkatkan kompleksitas penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang disebutkan dalam PP No. 71/2010 yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variable penelitian untuk menguji variable tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti penerapan standar akuntansi pemerintahan, perkembangan teknologi informasi, system informasiakuntansi, internal audit sertavariabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandi. 2006. Pengaruh respon perusahaan dalam investasi teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan: strategi bisnis, kematangan teknologi informasi, dan ukuran perusahaan sebagai variabel anteseden. Fakultas ekonomi universitas sebelas maret, Surakarta
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.
- Belajar Kilat SPSS 17. Penerbit Andi Yogyakarta dan Elcom Tahun 2010.
- Bandi. 2006. Pengaruh respon perusahaan dalam investasi teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan : strategibisni, kematangan teknologi informasi, dan ukuran perusahaan sebagai variable anteseden. Fakultas ekonomi universitas sebelas maret, Surakarta
- Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3): 319-339.
- Herawati ,Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur).STAR – Study & Accounting Research | Vol XI, No. 1 – 2014
- Sanjaya, I.P.S., (2005), Pengaruh Manfaat dan Kemudahan Pada Minat Berperilaku (behavioral intention) Dalam Penggunaan Internet, Kinerja, 9, 146-156.
- Palupi, Majang dan Heru Kurnianto Tjahjono. Aplikasi Technology Acceptance Model (Tam) Dengan Mempertimbangkan Gender Pada Perilaku Penggunaan Internet. Universitas Muhammad iyah Yogyakarta.
- Warren, S.Carl., and Reeve, M.James., and Fess,E. Philip. 2005. Corporate Financial Accounting. South Western: Thomson.
- Baridwan, Zaki. 2009. Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode, Edisi Kelima, Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Surendran, P. (2012). Technology acceptance model: a survey of literature. International Journal of Business and Social Research, 2(4),175-178
- Hall James A. 2009 : 6. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 4.Penerbit Salemba Empat.



- Onaolapo A.A and Odetayo T.A. 2012.Effect of Accounting Information System onOrganisati onalEffectiveness : A Case Study of Selected Construction Companies in Ibadan Nigeria. American Journal of Business and Management. Vol. 1.No. 4. 2012. 183-189.
- Turban, Efraim, et al. 2005. Decision Support Sitems and Intelligent Systems 7<sup>th</sup>Ed. New Jersey : Pearson Education.
- Yusuf, Syamsu LN. 2011. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Bodnar, George H, and William S.Hopwood. 2006. Sistem Informasi Akuntansi, Buku I. Jakarta: Penerbit salemba empat.
- Soudani, Siamak Nejad hosseini; 2012; The Usefulnessof an Accounting Information System forEffective Organizational Performance; International Journal of Economics and Finance;Vol. 4; p136-145.
- Salehi, Mehrdad.,et. al. (2011). Organizational commitment thesis. Journal of contemporary research in business, 3(7), 823-851
- Zare. F. Bolhari, A., Rezaeean, &A., Bolhari, J., (2012). The impact ofoccupational stress on quality of work life among the staff of e-workspace.World Academy of Science, Engineering and Technology, 3 (67): 314-318
- Edison, G., Manuere, F, Joseph, M., and Gutu, K. 2012.Evaluation of Factors Influencing Adoption of Accounting Informasi by Small to Medium Enterprises in Chinhoyi. Journalof Contemporary Research in Bussiness, 4(6), pp: 1126-1141.
- Al-eqab, M. and Adel, D. 2013. The Impact of IT Sophistications on the Perceived Usefulness of Accounting Information Characteristics among Jordanian Listed Companies. Journal of Bussiness and Social Science, 4(3), pp: 145-155.
- Gangga Almes. 2013. Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dalam Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar SMKN 1 Koto XI Tarusan. Skripsi
- Silviana. 2013. Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada 9 Kota Di

Provinsi Jawa Barat). Proceeding Call for Papers dan Seminar Nasional Fakultas Ekonomi UNS, 30-31 Mei 2013.

Mahdavi and Funel 2003.Public Sector Accountability and Accounting Information System in the Islamic republic Iran.Iranian Journal of Information Science and Technology, Volume 1 Number 2. July

Mahdi Salehi, Mahmood Hemmatfar, MarziyehBayat, 2010. Competitive Advantages and Strategic Information Systems. International Journal of Business and Management.Vol. 5, No. 7; July

Pornpan dejwittaya, Pairat. 2012. Effectiveness of accounting information system: effect on performance of Thai-listed firms in Thailand. International Academy of Business and Economics ISSN:1555-1296 Copyright: 07/01/2012.

Abdul Rochman. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi pengawasan dan Kinerja Pemda. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 9 Nomor 1

Diana Tien Irafahmi. 2005. Menuju Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang Baru. Jurnal Eksekutif. Volume 2 nomor 2

Moscove, SM Simkin and Bagnaroff 2009.Core concept of Accounting Information System.Newyork, NY, JohnWiley&Sons.Inc

Dita Arfianti. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NilaiInformasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. SkripsiUniversitasDiponegoro : Semarang.

Direktorat Aparatur Negara. 2006. Manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi pemerintah (suatu profil).

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Ashabul Nuzul dan Hadits Sahih. Bandung: Syaamil Quran, 2010.

Desi Indriasari, Ertambang Nahartyo. 2009. Pemgaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. JurnalAkuntansi.

- Faristina Rosalin. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang. Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.
- Gaspersz, Vincent. 2004. Perencanaan strategik untuk peningkatan kinerja sektor publik, suatu petunjuk praktek. Gramedia, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Hara. 2010. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, studi pada SKPD Kota Pekanbaru, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (Ed. 1). Yogyakarta: BPFE.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (Ed. 1). Yogyakarta: BPFE. Ibid, hal 15
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja sektor Publik (edisi 2). Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Michael C. Jensen, William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360
- Mardjiono, Didik Eko. 2009. Analisis Pengaruh kepemimpinan, pemanfaatan TI dan implementasi struktur organisasi yang terdesentralisasi terhadap kinerja organisasi. studi pada RSUD Kab. Temanggung, Tesis Universitas Padjajaran.

- Novita, Vina. 2008. Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi Dan Tingkat Kepercayaan Akuntan Mengenai Teknologi Sistem Informasi Yang Baruh Terhadap Kinerja Akuntan. Skripsi Universitas Riau: Pekanbaru.
- Prasetyono dan Kompyurini. 2007. Analisis Kinerja Rumah Sakit dengan pendekatan Balanced Scorecard berdasarkan Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern and Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Makassar : Simposium Nasional Akuntansi.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2007. Peranan Teknologi Informasi dalam peningkatan pelayanan di sektorpublik. Seminar Nasional Teknologi. Yogyakarta.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2007. Peranan Teknologi Informasi dalam peningkatan pelayanan di sektorpublik. Seminar Nasional Teknologi. Yogyakarta.
- Rizal djalil, Akuntabilitas kantor daerah. Cetakan pertama. Rmbooks, Jakarta 2014, hal 409.
- Republik Indonesia, Peraturan Menti Dalam Negri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sujarweni, V.W. 2014, SPSS Untuk Penelitian, Pustaka Baru: Jakarta
- Wijana, Nyoman. 2007. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Individual Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabanan. Jurnal. Universitas Udayana; Bali

*L*

*A*

*M*

*P*

*I*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

*R*  
ALAUDDIN

M A K A S S A R

*A*

*N*

**A. Uji Kualitas Data**

**1. Uji Validitas**

**a. Pengaruh teknologi informasi (X1)**

Jawaban Responden		STS	TS	R	S	SS	Total	Rata-rata	Ket
Bobot		1	2	3	4	5			
SIA1	F			6	12	14	32	4.25	ST
	Skor	0	0	18	48	70	136		
	%			18,8	37,5	43,8	100		
SIA2	F			2	18	12	32	4.3125	ST
	Skor	0	0	6	72	60	138		
	%			6,3	56,3	37,5	100		
SIA3	F		1	3	12	16	32	4.34375	ST
	Skor	0	2	9	48	80	139		
	%		3,1	9,4	37,5	50,0	100		
SIA4	F			3	17	12	32	4.28125	ST
	Skor	0	0	9	68	60	137		
	%			9,4	53,1	37,5	100		
SIA5	F			1	21	10	32	4.28125	ST
	Skor	0	0	3	84	50	137		
	%			3,1	65,6	31,3	100		
SIA6	F		2	3	17	10	32	4.09375	T
	Skor	0	4	9	68	50	131		
	%		6,3	9,4	53,1	31,3	100		
SIA7	F	1	1	6	13	11	32	4	T
	Skor	1	2	18	52	55	128		
	%	3,1	3,1	18,8	40,6	34,4	100		
SIA8	F	2	2	9	15	4	32	3.53125	T
	Skor	2	4	27	60	20	113		
	%	6,3	6,3	28,1	46,9	12,5	100		

**b. Kualitas Pengendalian Internal (X2)**

Jawaban Responden		STS	TS	R	S	SS	Total	Rata-rata	Ket
Bobot		1	2	3	4	5			
PI1	F			4	17	11	32	4.21875	ST
	Skor	0	0	12	68	55	135		
	%			12,5	53,1	34,4	100		
PI2	F			4	18	10	32	4.1875	T
	Skor	0	0	12	72	50	134		
	%			12,5	56,3	31,3	100		
PI3	F			3	14	15	32	4.375	ST
	Skor	0	0	9	56	75	140		
	%			9,4	43,8	46,9	100		
PI4	F			1	10	21	32	4.625	ST
	Skor	0	0	3	40	105	148		
	%			3,1	31,3	65,6	100		
PI5	F			1	21	10	32	4.28125	ST
	Skor	0	0	3	84	50	137		
	%			3,1	65,6	31,3	100		
PI6	F		2	4	17	9	32	4.03125	T
	Skor	0	4	12	68	45	129		
	%		6,3	12,5	53,1	28,1	100		
PI7	F			3	11	18	32	4.46875	ST
	Skor	0	0	9	44	90	143		
	%			9,4	34,4	56,3	100		
PI8	F			7	17	8	32	4.03125	T
	Skor			21	68	40	129		
	%			21,9	53,1	25,5	100		
PI9	F			8	16	8	32	4	T
	Skor			24	64	40	128		
	%			25,0	50,0	25,0	100		

c. **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Jawaban Responden		STS	TS	R	S	SS	Total	Rata-rata	Ket
Bobot		1	2	3	4	5			
LK1	F		1	4	14	13	32	4.21875	ST
	Skor	0	2	12	56	65	135		
	%		3,1	12,5	43,8	40,6	100		
LK2	F			4	15	13	32	4.28125	ST
	Skor	0	0	12	60	65	137		
	%			12,5	46,9	40,6	100		
LK3	F			1	24	7	32	4.1875	T
	Skor	0	0	3	96	35	134		
	%			3,1	75,0	21,9	100		
LK4	F			2	18	12	32	4.3125	ST
	Skor	0	0	6	72	60	138		
	%			6,3	56,3	37,5	100		
LK5	F			5	15	12	32	4.21875	ST
	Skor	0	0	15	60	60	135		
	%			15,6	46,9	37,5	100		
LK6	F		1	7	14	10	32	4.03125	T
	Skor	0	2	21	56	50	129		
	%		3,1	21,9	43,8	31,3	100		
LK7	F		1	5	13	13	32	4.1875	T
	Skor	0	2	15	52	65	134		
	%		3,1	15,6	40,6	40,6	100		
LK8	F		1	4	15	12	32	4.1875	T
	Skor		2	12	60	60	134		
	%		3,1	12,5	46,9	37,5	100		
LK9	F			7	7	18	32	4.34375	ST
	Skor			21	28	90	139		
	%			21,9	21,9	56,3	100		
LK10	F			4	9	19	32	4.46875	ST
	Skor	0	0	12	36	95	143		
	%			12,5	28,1	59,4	100		



## 2. Uji Realibilitas

### a. System informasi SIA (X1)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	32	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	32	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.809	8

### b. Kualitaspengendalian internal(X2)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	32	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	32	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.870	9

**c. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	32	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	32	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.909	10

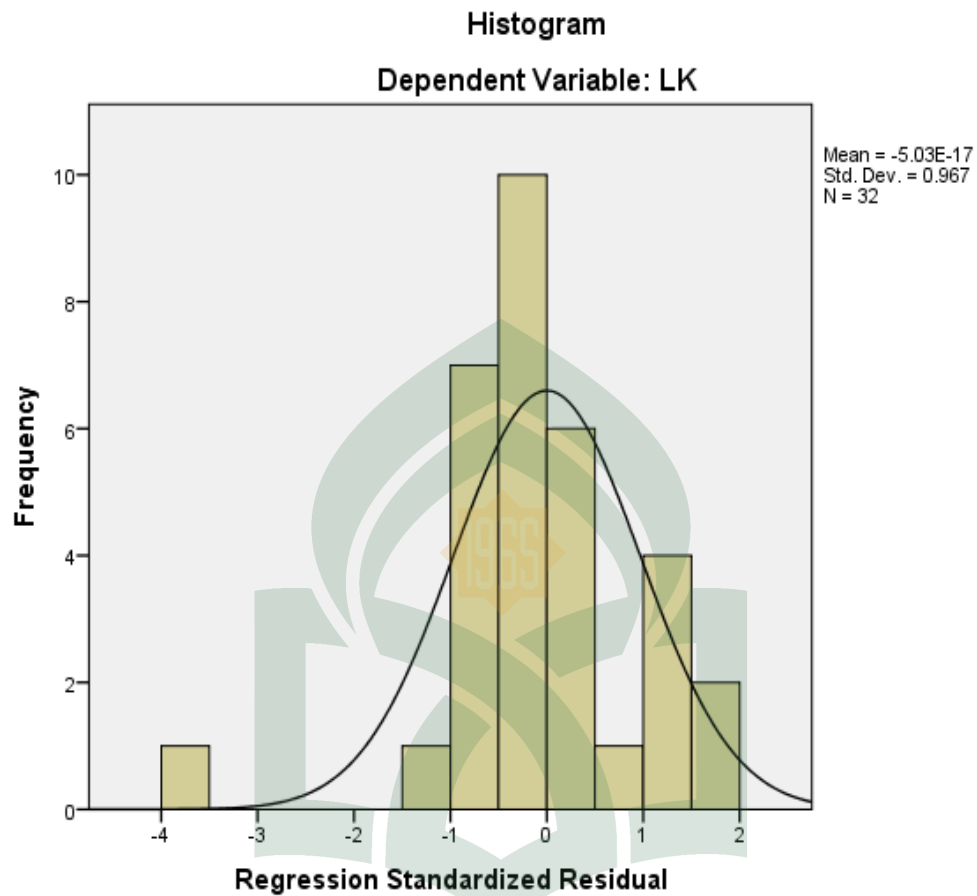
**B. Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.39126679
Most Extreme Differences	Absolute	.188
	Positive	.154
	Negative	-.188
Test Statistic		.188
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.

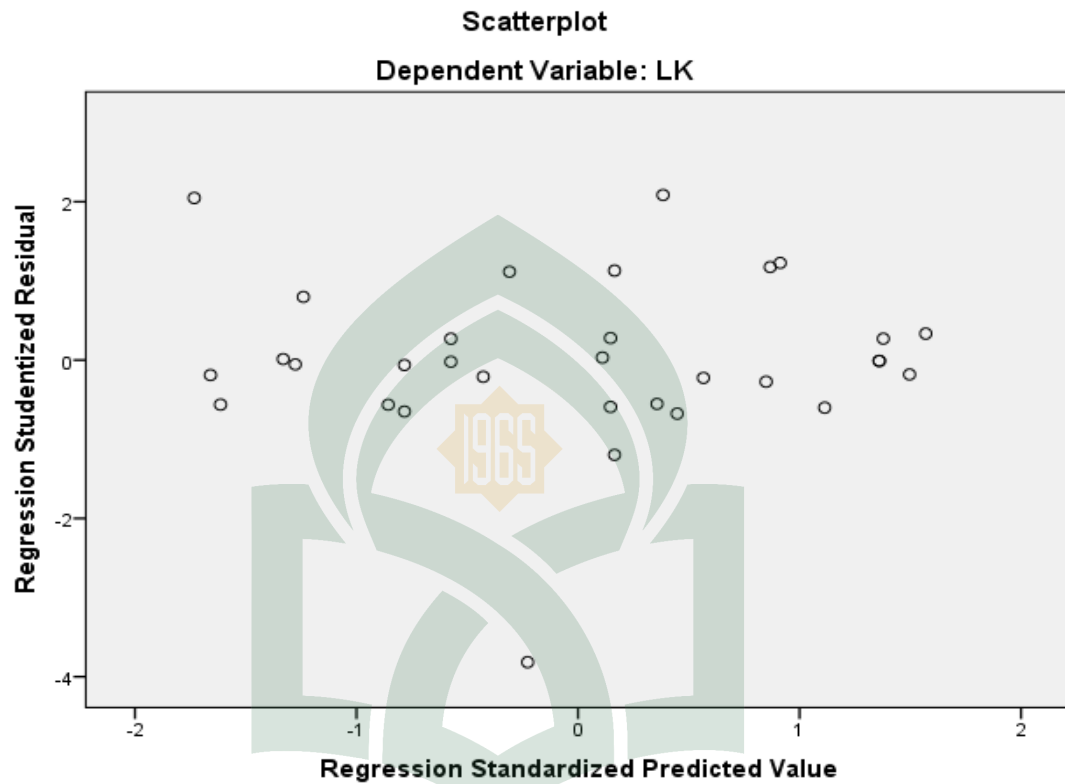


## 2. Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>								
		Unstandardized		Standardize		Collinearity		
		Coefficients		d		Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant )	3.876	6.527		.594	.557		
	SIA	.075	.158	.060	.474	.639	.882	1.134
	PI	.939	.158	.749	5.960	.000	.882	1.134

a. Dependent Variable: LK

### 3. Uji Heteroskedastisitas



### 4. Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,792 <sup>a</sup>	,628	,613	2,831	1,885

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

### C . Uji Hipotesis Regresi Berganda

Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 <sup>a</sup>	.596	.568	3.50626

a. Predictors: (Constant), SIA, PI

Hasil Uji F – Uji Simultan

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	525.354	2	262.677	21.367	.000 <sup>b</sup>
Residual	356.521	29	12.294		
Total	881.875	31			

a. Dependent Variable: LK

b. Predictors: (Constant), SIA, PI

Hasil Uji T Hitung

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.876	6.527		.594	.557
PI	.939	.158	.749	5.960	.000
SIA	.075	.158	.060	.474	.639

a. Dependent Variable: LK

## LAMPIRAN DATA RESPONDEN

A.	SISTEM INFORMASI AKUNTANSI								Jumlah
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	2	4	4	4	4	4	3	28
4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	4	5	4	4	4	4	4	33
6	3	1	4	4	4	4	4	2	26
7	4	4	5	4	4	4	4	4	33
8	4	5	5	4	4	4	4	4	34
9	4	4	4	4	4	4	1	1	26
10	3	4	5	4	4	5	5	5	35
11	5	2	3	5	5	3	2	1	26
12	1	5	5	5	2	5	5	4	32
13	5	4	5	3	5	4	5	4	35
14	5	4	4	5	4	4	4	3	33
15	4	4	4	5	4	4	4	3	32
16	4	4	4	3	4	4	4	3	30
17	4	4	4	3	4	4	3	4	30
18	3	5	5	5	4	2	3	4	31
19	5	5	4	3	4	4	4	4	33
20	5	5	4	3	5	4	3	3	32
21	5	5	3	4	2	4	5	5	33
22	3	4	3	5	5	2	3	2	27
23	5	4	5	5	5	5	5	4	38
24	5	4	5	5	5	5	4	4	37
25	5	5	5	5	4	3	3	3	33
26	4	3	2	5	3	4	3	3	27
27	4	4	5	5	5	5	4	5	37
28	5	5	5	5	5	5	5	3	38
29	5	5	5	5	5	5	5	4	39
30	5	4	5	4	5	5	5	4	37
31	5	5	5	5	5	5	5	3	38
32	5	5	4	4	5	3	5	4	35



	LAPORAN KEUANGAN										JUMLAH
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
5	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	37
6	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37
7	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
8	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	45
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
10	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	45
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
12	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	41
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
14	4	4	3	4	3	4	4	4	5	5	40
15	5	4	4	4	4	3	4	4	5	5	42
16	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	43
17	3	4	4	4	5	5	5	4	5	5	44
18	3	3	4	4	4	3	5	4	3	4	37
19	3	4	4	4	4	3	5	4	3	5	39
20	4	3	4	4	4	3	5	4	3	5	39
21	3	4	5	5	4	3	2	3	3	3	35
22	2	3	3	4	3	3	3	2	3	3	29
23	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
24	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	45
25	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
26	4	4	5	3	3	2	4	3	3	3	34
27	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	47
28	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	48
29	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
31	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	48
32	5	5	4	3	5	4	5	4	5	4	44



# **KUESIONER PENELITIAN**

**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER  
DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bone)**



**Peneliti :**

**HASNIDAR**

**(Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)**

**NIM : 10800111053**

**LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

**KUESIONER PENELITIAN**  
**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER DAN**  
**PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**  
**( StudiEmpirisPadaPemerintah Daerah Kab.Bone)**  
**Universitas Islam NegeriAlauddin Makassar**

---

Kepada Yth:

Bapak/Ibu / Saudara(i) Responden  
di-  
t e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir/skripsi demi memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) jurusan akuntansi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Maka dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara (I) untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk tanggapan terhadap beberapa pernyataan yang tersedia dalam kuesioner ini mengenai topik **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah”**. Adapun pengumpulan data dari kuesioner ini semata-mata hanya digunakan untuk keperluan akademis dan penelitian guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semua data dalam kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti.

Kesediaan dan kerjasama yang Bapak/Ibu/Saudara (i) berikan dalam bentuk informasi yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan penelitian ini. Selain itu, jawaban yang Bapak/Ibu berikan juga merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi penulis pada khususnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bone pada umumnya.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i) yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Makassar, Oktober 2015

Hormat saya,

Peneliti

## A. DATA IDENTITAS RESPONDEN

1. No. Responden : .....(Diisi oleh peneliti)
2. Nama (boleh tidak diisi) : .....
3. Jenis Kelamin : ☐ laki-laki ☐ Perempuan
4. Usia : ☐ <25 Tahun ☐ 25-35 Tahun ☐ 36-45 Tahun  
☐ 46-55 Tahun ☐ >55 Tahun
5. Pendidikan Terakhir : ☐ SMU ☐ D-3 ☐ S-1 ☐ S-2 ☐ S-3
6. Jabatan : ☐ Kepala ☐ Dinas/Bagian/Sub Bagian  
☐ Staf/Pegawai
7. Lama Bekerja : ☐ <1 Tahun ☐ 1-5 Tahun ☐ 6-10 Tahun  
☐ 11-15 Tahun ☐ 16-20 Tahun ☐ 21-25 Tahun  
☐ 26-30 Tahun ☐ >31 Tahun

## B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Adapun petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) diharapkan untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan jujur dan apa adanya..
2. Berilah tanda (✓) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternative jawaban paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapak/Ibu/Saudara (i) pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini.
4. Terdapat 5 (lima) alternative jawaban yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut :

Simbol	Kategori	Bobot Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
R	Ragu/Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

## DAFTAR PERTANYAAN

### VARIABEL X1 (PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI)

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Dalam melaksanakan tugas sebagian akuntansi/ keuangan memiliki komputer yang cukup.					
2	Jaringan internet terpasang di unit kerjasecara <i>Local Area Networt (LAN)</i> atau <i>Wide Area Networt (WAN)</i> .					
3	Jaringan internet terpasangdandimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.					
4	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
5	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
6	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					
7	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.					
8	Peralatan yang usang/ rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya					
Hasnidar : 2015						

### VARIABEL X2 (PEGENDALIAN INTERN AKUNTANSI)

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Sebagian keuangan/ akuntansi harus menyelenggarakan sistem akuntansi yang meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset, serta selain kas					
2	Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang					
3	Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.					
4	Setiaptransaksiharusdicatatdalambukucatatatan akuntansi.					
5	Catatan akuntansi dijaga untuk tetap “up-to-date”.					
6	Laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebihdahulu oleh kepala sub bagian keuangan/ akuntansi sebelum di distribusikan					

7	Sistem akuntansi yang ada harus memungkinkan adanya pelaksanaan audit					
Hasnidar: 2015						

**VARIABEL Y (PELAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH)**

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan harus tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.					
2	Neraca merupakan bagian penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan harus di sajikan.					
3	Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD harus disajikan.					
4	Catatan atas laporan keuangan harus di sajikan.					
5	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dikatakan andal jika dapat diuji.					
6	Rekonsiliasi antara catatan akuntansi dengan catatan bank sebaiknya dilakukan secara periodik.					
7	Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak boleh berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.					
8	Informasi yang dibutuhkan harus segera tersedia ketika diminta.					

Hasnidar: 2015

## RIWAYAT HIDUP



Hasnidar, Dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan Pada Tanggal 10 Agustus 1993. Penulis merupakan anak ke-dua dari empat bersaudara, buah hati dari ibunda Some dan Ayahanda Mappe. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negri No 152 Kalainakiri II, Setelah Tammat SD Tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikan SMP Negri II Mangkutana Hingga Tahun 2008, Kemudian Pada Tahun Tersebut, Penulis Melanjutkan Pendidikan di SMA Negri 1 Tomoni Hingga Tahun 2011, Kemudian Penulis Melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi dan Menyelesaikan Studi Pada Tahun 2015.